

**DAMPAK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT**

**(Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Nurrohmah Nasywa Zulfiana

NIT. 22314426

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The implementation of accountability and transparency in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) is one of the efforts to achieve good governance and enhance public trust in the village government. Pucung Village, Girisubo District, Gunungkidul Regency, has implemented various forms of accountability and transparency through community involvement in deliberation meetings, submission of accountability reports, and dissemination of budget information through various media. However, several challenges remain that may affect the effectiveness of accountability and transparency implementation as well as the level of public trust. Therefore, this study aims to examine the impact of accountability and transparency in APBKal management on public trust, identify the challenges encountered in realizing accountability and transparency, and analyze the solutions implemented by the Pucung Village Government to overcome these challenges.

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews and documentation involving informants consisting of the Village Head, Village Secretary, Financial Affairs Officer, Chairperson and Members of the Village Consultative Body (Bamuska), community leaders, and residents of Pucung Village. The data were analyzed using thematic analysis.

The results indicate that the implementation of accountability and transparency in APBKal management in Pucung Village has a positive impact on public trust. Accountability is reflected through community involvement in the planning, implementation, reporting, and accountability stages of budget management, while transparency is carried out through village deliberation meetings, the village website, social media, APBKal billboards, and development information boards. The application of these principles enhances public understanding, participation, and trust, while also supporting the management of village assets, particularly village treasury land. Nevertheless, the implementation still faces several challenges, including limited human resources, changes in policies and regulations, and budget constraints. To address these challenges, the Pucung Village Government has improved information dissemination and public outreach, strengthened coordination with relevant stakeholders, involved the community in development planning deliberations, and implemented priority-based budgeting according to village needs and financial capacity.

Keywords: *accountability, transparency, Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal), and public trust.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kajian Literatur.....	16
B. Kajian Teori.....	21
C. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Oprasionalisasi Penelitan.....	30
1. Subjek Penelitian	30
2. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	30
3. Jumlah Informan.....	31
4. Jenis Data.....	33
5. Teknik Pengumpulan Data	34

6. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Kondisi Geografis dan Demografis Kalurahan Pucung	37
1. Kondisi Geografis Kalurahan Pucung	37
2. Kondisi Lereng dan Iklim	38
3. Pertanahan dan Tata Ruang	39
4. Kondisi Demografi	39
B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Pucung	42
BAB V DAMPAK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI	
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT	44
A. Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)	44
B. Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Bagi Pemerintah Kalurahan	51
C. Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Bagi Masyarakat Kalurahan Pucung	56
D. Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Bagi Pihak Lain	61
BAB VI KENDALA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN	
TRANSPARANSI	64
A. Kendala Internal	64
B. Kendala Eksternal	65
BAB VII SOLUSI MENGATASI KENDALA DALAM MEWUJUDKAN	
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI	70
A. Mengatasi Kendala Internal	70
B. Mengatasi Kendala Eksternal	72
BAB VIII PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kalurahan, sebagai garda terdepan pelayanan publik, memegang peranan vital dalam pembangunan wilayah perdesaan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan 15 Januari 2014 yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Desa. Pemberlakuan peraturan tersebut memberi otonomi yang lebih besar bagi kalurahan dalam mengelola sumber daya lokalnya, termasuk keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan kalurahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, dengan memperhatikan potensi, kebutuhan, serta prioritas pembangunan di tingkat lokal.

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu pengaruh kuat yang menimbulkan perubahan baik positif maupun negatif dalam kehidupan. (Aprilistya et al., 2023) menjelaskan bahwa dampak adalah perubahan nyata yang muncul sebagai konsekuensi dari sebuah kebijakan terhadap sikap maupun perilaku masyarakat. Dalam konteks administrasi pemerintahan, dampak dapat dimaknai sebagai hasil, pengaruh, atau konsekuensi dari tindakan atau kebijakan suatu pihak yang berhubungan langsung dengan aktivitas publik.

Dalam konteks pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), dampak menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan pemerintah kalurahan mampu menghasilkan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Dampak dapat terlihat dari meningkatnya efektivitas layanan publik,

bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan, serta terciptanya tata kelola keuangan yang lebih tertib dan akurat. Selain itu, dampak juga dapat muncul dalam bentuk partisipasi masyarakat yang lebih besar, pemanfaatan anggaran yang lebih tepat sasaran, serta penguatan kapasitas pemerintahan kalurahan dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. (Sangki et al., 2016) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang memberikan jaminan kepada publik untuk mengakses berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, baik terkait kebijakan, proses penyusunan, maupun pencapaian program. Senada dengan hal tersebut, (Sabili et al., 2023) menekankan bahwa transparansi diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan anggaran yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Dalam (Siregar et al., 2019) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak yang diberi tanggung jawab untuk melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dikelola kepada pihak pemberi amanah. Sementara itu, dalam (Rusrina, 2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas yaitu mengandung unsur pertanggungjawaban atas kinerja organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi maupun pengawasan terhadap aktivitas tersebut.

Belanja kalurahan, yang merupakan bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), berfungsi sebagai instrumen perencanaan tahunan pemerintah kalurahan yang disusun bersama Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku (Darmawati & Budiantara, 2023). Evaluasi atas efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) diperlukan untuk menilai perkembangan dan kemandirian

kalurahan, keberlanjutan pembangunan, serta pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional dari pinggiran.

Dalam implementasinya, Pemerintahan Kalurahan Pucung menerapkan beberapa cara untuk memastikan terselenggaranya akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), antara lain:

1. Publikasi Anggaran: Pemerintah Kalurahan Pucung memublikasikan APBKal, baik rencana maupun realisasi, melalui papan informasi, media sosial, dan *website* kalurahan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
2. Musyawarah Kalurahan (Muskal): Perencanaan dan penetapan anggaran dilakukan melalui Muskal yang melibatkan Badan Permasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat sebagai wujud akuntabilitas partisipatif.
3. Laporan Pertanggungjawaban: Pemerintah kalurahan menyampaikan laporan realisasi APBKal kepada Bupati melalui Kapanewon serta kepada BPKal sebagai bentuk akuntabilitas vertikal dan horizontal.
4. Pengawasan: Pengawasan dilakukan oleh BPKal dan perangkat kalurahan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.

Dalam pelaksanaannya kepercayaan Masyarakat menjadi hal terpenting dalam terjalannya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. (Prihatini & Hidayati, 2019) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan pernyataan mental maupun verbal yang menggambarkan pengetahuan serta penilaian seseorang terhadap suatu gagasan atau objek. Kepercayaan merupakan kesediaan seseorang untuk berperilaku tertentu karena adanya keyakinan bahwa pihak lain akan memenuhi harapannya, disertai dengan harapan bahwa kata-kata, janji, maupun pernyataan orang yang dapat dipercaya.

Fenomena pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, memperlihatkan dinamika menarik terkait bagaimana akuntabilitas dan transparansi diterapkan di tingkat pemerintahan paling dekat dengan warga. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kalurahan telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat, baik melalui papan informasi maupun forum-forum musyawarah. Informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran secara umum telah disampaikan secara terbuka.

Namun, meskipun secara formal informasi telah diberikan, masih terdapat masyarakat yang merasa bahwa penyampaian tersebut belum sepenuhnya mudah diakses atau dipahami, terutama bagi masyarakat yang kurang familiar dengan istilah teknis pengelolaan keuangan desa. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi yang beragam: sebagian masyarakat merasa puas dan percaya pada pemerintah Kalurahan, sementara sebagian lainnya tetap menyimpan keraguan mengenai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi tersebut benar-benar dijalankan. Dinamika inilah yang menjadi penting untuk dikaji, mengingat kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama bagi efektivitas pemerintahan lokal, terutama dalam konteks budaya masyarakat perdesaan yang menjunjung tinggi nilai kedekatan sosial, keterbukaan, dan musyawarah.

Secara lebih luas, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa merupakan isu strategis di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan besar kepada Desa dalam mengelola anggaran. Peningkatan dana desa setiap tahunnya mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan bagaimana anggaran dialokasikan, digunakan, serta dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa sebagian desa mengalami hambatan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, mulai dari keterbatasan

kapasitas aparatur hingga resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Dalam konteks ini, fenomena yang terjadi di Kalurahan Pucung bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari dinamika perubahan tata kelola desa di Indonesia yang sedang beradaptasi menuju pemerintahan yang lebih modern dan partisipatif.

Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang pertanahan, khususnya dalam pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD). Tanah Kas Desa (TKD) merupakan aset milik kalurahan yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PADKal). Oleh karena itu, pengelolaan, pemanfaatan, dan pencatatan Tanah Kas Desa yang tercermin dalam APBKal harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat mengetahui bagaimana aset tersebut dikelola dan bagaimana pendapatan yang dihasilkan dimanfaatkan. Dengan demikian, pengelolaan Tanah Kas Desa yang baik dapat mencegah penyimpangan, meminimalkan konflik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan.

Selain itu, APBKal menjadi sumber pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan di tingkat kalurahan yang mendukung pemanfaatan tanah dan sektor pertanian, seperti pembangunan jalan usaha tani, embung, jaringan irigasi, serta sarana dan prasarana pertanian. Dalam konteks reforma agraria, anggaran kalurahan juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis tanah melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas APBKal tidak hanya berdampak pada tata kelola keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi pengelolaan tanah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kepatuhan

administratif dan kesesuaian terhadap regulasi, serta belum secara mendalam mengkaji dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan lokal. Selain itu, kajian yang secara spesifik meneliti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbatas, terutama yang menyoroti kesenjangan antara keterbukaan informasi secara formal dengan tingkat pemahaman dan aksesibilitas informasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan yaitu menganalisis secara komprehensif dampak akuntabilitas dan transparansi APBKal terhadap kepercayaan masyarakat dalam konteks Pemerintahan Kalurahan, sehingga memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan tata kelola keuangan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya di Kalurahan Pucung, Kapanewon Giriubo, Kabupaten Gunungkidul. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses pelaksanaan, berbagai kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan terhadap Kepercayaan Masyarakat (Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Giriubo, Kabupaten Gunungkidul)”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas dan transparansi sering kali menghadapi kendala, baik dalam aspek administratif, partisipatif, maupun dalam

penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan serta bagaimana dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak akuntabilitas dan transparansi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) terhadap kepercayaan masyarakat di Kalurahan Pucung?
2. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) terhadap kepercayaan masyarakat di Kalurahan Pucung?
3. Apa solusi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Pucung untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dampak akuntabilitas dan transparansi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Pucung terhadap kepercayaan masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat di Kalurahan Pucung.
 - c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Pucung untuk mengatasi kendala yang dihadapi untuk mewujudkan dampak positif akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) terhadap kepercayaan masyarakat di Kalurahan Pucung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian, yaitu:

1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi Kementerian ATR/BPN dalam rangka evaluasi dan peningkatan kebijakan terkait tata Kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

2) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Penelitian ini berfungsi sebagai *reservoir* pengetahuan yang dapat menambah sumber akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional serta menjadi referensi bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

3) Pemerintah Kalurahan Pucung

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh Pemerintah Kalurahan Pucung untuk memperkuat praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

4) Peneliti

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi peneliti sebagai bagian dari pemenuhan prasyarat akademik untuk kelulusan, sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan di Tingkat Kalurahan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) terhadap kepercayaan masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Pucung memberikan dampak positif terhadap hubungan antara pemerintah kalurahan dan masyarakat, terutama melalui meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. Akuntabilitas diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sementara itu, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi APBKal melalui musyawarah kalurahan, website, media sosial, baliho APBKal, dan papan informasi kegiatan pembangunan. Penerapan kedua prinsip tersebut meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan anggaran, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan, serta mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, dukungan terhadap program pembangunan, dan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
- b. Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan masih menghadapi beberapa kendala, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi pemahaman dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Sementara itu, kendala eksternal meliputi perubahan kebijakan dan regulasi serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan

tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan pemerintah kalurahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

- c. Pemerintah kalurahan pucung telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Upaya yang dilakukan untuk kendala internal berupa keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang memengaruhi pemahaman dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemerintah kalurahan tidak hanya menyampaikan informasi melalui baliho, media sosial, dan website, tetapi juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat ditingkat padukuhan. Melalui kegiatan tersebut, informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan disampaikan dengan Bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, untuk mengatasi kendala eksternal terkait perubahan kebijakan dan regulasi serta keterbatasan anggaran, pemerintah kalurahan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan, serta penerapan skala prioritas Pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran kalurahan.

B. Saran

- a. Bagi Pemerintah Kalurahan Pucung

Pemerintah kalurahan pucung perlu terus meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, terutama dalam penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan media informasi baik secara langsung maupun digital perlu terus dioptimalkan agar masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih luas dan merata.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarullah, A. K. (2023). *Kajian Literatur Dalam Menyusun Referensi Kunci, State Of Te Art, Dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty)*. 37–52.
- Aprilistya, A., Azhari, C. V., & Pramesti, C. A. (2023). *Dampak Media Sosial Terhadap Penurunan Nilai*. 2(2).
- Asyriah, N., Amrullah, M. K., Tinggi, S., Islam, A., Ulum, D., Tinggi, S., Islam, A., Ulum, D., Tinggi, S., Islam, A., & Ulum, D. (2022). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa dalam Perspektif Good Governance: Studi Kasus Desa Sidodadi, Lampung Timur Navid*. 5(2), 166–172.
- Cahyaningrum, F. M., & Ariani, K. R. (2022). Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Toriyo Kecamatan Sukoharjo). *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, 4(April), 300–308. <https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/325/>
- Darmawati, N. P. A., & Budiantara, M. (2023). *Pendampingan Pembuatan Apbkal Sebagai Bentuk Transparansi Publik Pemerintah Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul*. 2(11), 6937–6946.
- Gunungkidul, B. P. S. K. (2025). *Kecamatan Girisubo dalam Angka*. 20, 2025.
- Hamzah, M., Surahman, F., Abdurahman, Imam, A., Saputri, E., & Basyarahil, A. (2021). *Transparansi Anggaran Publik Sebagai Kunci Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah*. 32(3), 167–186.
- Iqbal, M., & Riyadi, A. (2025). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Transparansi Anggaran Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(Januari-April), 46–63.
- Kurniawan, B. T. (2017). Pengembangan Lingkar Wilis, Dampak, Sosial Ekonomi. *Jurnal AGRIBIS*, 13(15), 55-85., 1–31. <https://journal.unita.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/121>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nugroho, A. (2025). *Riset Agraria dengan Metode Kualitatif*.
- Peraturan Kalurahan Terong Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan

- Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025. (1967).
- Pucung, K. (2026). *RKPKalurahan Pucung Tahun 2025*. 1–56.
- Radlia, S. T. (2019). *Pilihan Rasional Komunitas Terhadap Penerimaan Program*. 2(3). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.631>
- Rusdin, & Pardana, D. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau). *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 01(2), 70–74. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1362%0A>
- Rusrina, R. (2021). *Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. 1–9. <https://eprints.unm.ac.id/id/eprint/21450>
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). *Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)*. 11(2), 233–249.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2016). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Siregar, O. K., Hasibuan, H. A., Natasi, A., & Erhan, J. (2019). *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 Tanjungbalai*. 10(1), 57–71.
- Skinner, B. F. (2014). *SCIENCE AND HUMAN*.
- Sugiyanto. (2025). *Tata Kelola Koperasi dengan Pendekatan Stewardship atau Agency Theory*. 1(2), 189–198.
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Owner*, 6(2), 1798–1811. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>
- Syamni, G. (2010). PROFIL SOCIAL CAPITAL SUATU KAJIAN LITERATUR. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, September, 17(2), 377–484. <https://about.jstor.org/terms>
- Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud*. 1.

- Udzmah, S. L., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 9(1), 31–42. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21823>
- Yurika Aulia, Deana Sari Br Hasibuan, Hetri Waruwu, Priska Devriski Gulo, & Silvia Nurhaliza. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>